

## Bab 2

### Landasan Teori

#### 2.1 Teori Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain (Jones, 2009). Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Midgley (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “*..a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Agar dapat memahami lebih dalam apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial berikut definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli .

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud, 2006). Menurut Suharto ( 2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan adalah sebagai berikut di bawah ini.

Menurut Suparlan dalam Suud (2006:5), kesejahteraan sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Suud (2006:8) :

Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam Suud (2006:5)

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.

Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Midgley masih dalam Suud (2006:5) menjelaskan bahwa:

Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Itu adalah, pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan terakhir, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat.

Definisi-definisi di atas menekankan pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan. Setiap kelompok mempunyai definisi yang berbeda dari berbagai ahli.

Berikut definisi-definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan menurut beberapa ahli:

Menurut Durham dalam Suud (2006:7), kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera.

Selanjutnya Wilensky dan Lebeaux dalam Suud (2006:7) merumuskan kesejahteraan sosial sebagai:

Sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar tercipta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada individu-individu pengembangan kemampuan-kemampuan mereka seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Menurut Wickedan dalam Suud (2006:8) mengemukakan bahwa:

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial.

Arti kesejahteraan yang terakhir adalah kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, orang-orang yang mempunyai berbagai macam kebutuhan akan pelayanan-pelayanan tersebut di atas, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar, maka mereka menjadi sasaran atau perhatian kesejahteraan sosial (Suhartono, 1993:6). Aksi sosial sebagai metode bantu dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dapat melalui jalan perundang-undangan. Menurut Segal dan Brzuzy dalam Suud (2006:90), Kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk sederhana, sistem kesejahteraan sosial dapat dikonseptualisasikan sebagai empat bagian yang saling berhubungan sebagai berikut: 1) isu-isu sosial; 2) tujuan-tujuan kebijakan; 3) perundangan/peraturan; 4) program-program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui penerapan suatu program kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*) (Sen,2008:8). Yang paling berhubungan dengan dengan sistem kesejahteraan sosial bagi para *homeless* ini adalah *seikatsu hogo*. Pemerintah memberikan perlindungan hidup (*seikatsu hogo*) kepada masyarakat Jepang. *seikatsu hogo* adalah jaminan perlindungan terhadap *standart* hidup untuk semua warga Jepang dan tidak boleh ada diskriminasi, dan orang yang hidup miskin dapat menuntut pertolongan bantuan dari pemerintah (Kennett dan Iwata, 2003:63). Kemudian menurut Okamura dalam Takehara (2005:113)

社会福祉問題を、ほかの社会問題から別々して認識するためには、まず、その認識を可能にするような原理なり立場なくてはならないであろう。このような原理があつて初めて、混沌たる生活問題の中から、社会福祉固有の問題をつかみとることができるのである。

Terjemahan :

Untuk dapat mengetahui atau memahami masalah kesejahteraan sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial lainnya pertama kita harus mengetahui keadaan dari masalah sosial tersebut. Setelah prinsip dasar itu diketahui, melalui permasalahan hidup kita dapat mendapatkan karakteristik dari kesejahteraan sosial.

Kemudian Okamura dalam Takehara (2005:114) juga menjabarkan

そして、その社会福祉固有の問題の原初形態は社会生活の基本的要求（1. 経済的安定の要求、2. 職業安定の要求、3. 家族安定の要求、4. 保険・医療の要求、5. 教育の保障の要求、6. 社会参加ないし社会的協同の機会要求、7. 文化・娯楽の機会の要求）である

Terjemahan :

Bahwa ada tujuh karakteristik di dalam kesejahteraan sosial yaitu:

- 1) tuntutan ekonomi yang stabil
- 2) tuntutan pekerjaan yang layak
- 3) tuntutan keluarga yang stabil
- 4) tuntutan jaminan kesehatan
- 5) tuntutan jaminan pendidikan
- 6) tuntutan kesempatan dalam bermasyarakat
- 7) tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi

Hal-hal di atas menjadi tuntutan dasar dalam masyarakat sosial. Ketika semua karakteristik atau tuntutan dasar dalam kehidupan bermasyarakat sudah terpenuhi secara otomatis kesejahteraan sosial juga sudah didapat. Okamura dalam Takehara (2005:114) juga menjelaskan

社会生活の基本的要求をもつ個人が、それぞれの要求に関する社会制度を利用することによって、その基本的要求を充足する過程が、われわれの社会生活にほかならない。

Terjemahan:

Kesejahteraan sosial sebagai bantuan untuk dapat fokus kepada aspek subjektif dari kesulitan dalam hubungan sosial dan bantuan harus dibedakan dengan kebijakan sosial lainnya.

## 2.2 Teori Kemiskinan Struktural

Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Menurut Suparlan (1995: xi) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standart hidup rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan ini secara tidak langsung tampak pengaruhnya dalam bidang kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000: 107) adalah sebagai berikut :

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.

Pada masyarakat modern yang rumit kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap mereka yang membenci kemiskinan tadi, seseorang bukan merasa dirinya miskin karena kurang makan, pakaian atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Persoalan menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi tetapi gagal mencari

pekerjaan bagi mereka. Pokok persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga timbul tuna karya, tuna susila, tuna wisma, dan sebagainya. Secara sosiologis sebab-sebab timbulnya masalah ini adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi (Soekanto, 2009:320). Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang ada dalam setiap masyarakat di negara manapun, termasuk Jepang. Kemiskinan umumnya ditandai dengan ketimpangan suatu kesenjangan, antara lain kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha, ketrampilan, dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial yang timpang. Menurut Sitorus (2009:25) kemiskinan struktural adalah kemiskinan disebabkan oleh sistem atau struktur yang menimbulkan masalah bagi mereka yang menginginkan pekerjaan, seperti gaji minimum yang tidak cukup, sulitnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik karena jumlah pekerjaan yang terbatas, dan kurangnya pertumbuhan di sektor yang mendukung pekerjaan dengan *skill* rendah, sehingga mereka semakin terbelakang dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja non regular, seperti buruh harian, pekerja *part time*, dan lain-lain.

Analisis kemiskinan struktural juga dipakai oleh Toshikatsu dalam Sitorus (2009:23), yang menyatakan bahwa, kepala seksi bantuan sosial Jepang yang menganalisis bahwa penyebab kemiskinan di Jepang adalah `kemiskinan struktural` (*kouzoujyou no hinkon*). Dia mengatakan, rendahnya penghasilan buruh harian, meningkatnya angka pengangguran, dan berkurangnya kesempatan kerja bagi orang yang sudah tua disebabkan oleh struktur ekonomi. Selain itu, beliau juga menyatakan

bahwa kemiskinan disebabkan oleh sistem kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik. Masalah kemiskinan ini dapat ditanggulangi dengan mengadakan pendekatan kebutuhan pokok yang di butuhkan yang pada hakekatnya adalah program kesejahteraan atau bantuan untuk orang-orang tidak mampu.

### **2.3 Konsep *Homeless***

Pada tahun 1980-an *homeless* tidaklah menjadi suatu masalah dan tidak tampak kepermukaan karena jumlahnya yang sedikit, hal ini dikarenakan yang mengalami *homeless* pada masa itu terbatas hanya di kalangan buruh harian di *yoseba* atau kemah para buruh kasar yang tidak mendapat lowongan pekerjaan. Pada tahun 1990-an jumlah *homeless* yang semakin banyak membuatnya semakin tampak ke permukaan karena meningkatnya jumlah buruh harian yang menjadi *homeless*. Meningkatnya jumlah *homeless* menjadikan *homeless* sebagai fenomena sosial atau masalah sosial yang cukup menjadi perhatian. Hal ini dapat dilihat dari media-media masa yang banyak menjadikan *homeless* sebagai topik utama berita mereka. Tepatnya pada tahun 1992 jumlah *homeless* di Jepang mulai meningkat tajam karena terjadinya resesi ekonomi (Iwata, 1997:15). Banyaknya pegawai yang di putus hubungan kerja akibat perusahaan-perusahaan kecil yang bangkrut merupakan penyebab utama meningkatnya jumlah *homeless* di Jepang. Karena keberadaannya yang semakin tampak kepermukaan mulai banyak juga pendapat-pendapat yang muncul. Sebagian menganggap kaum *homeless* merupakan masalah besar karena mereka merupakan sampah masyarakat, tetapi sebagian besar menganggap kaum *homeless* merupakan kaum lemah yang wajib untuk dibantu atau mendapatkan

bantuan dan kehidupan yang layak. Peristiwa sekelompok pelajar sekolah menengah atas yang dengan teganya membakar seorang *homeless* yang sedang tidur dipinggir jalan dengan alasan bahwa *homeless* adalah sampah masyarakat dan sampah haruslah dibakar karena tidak berguna merupakan contoh dari pandangan masyarakat yang berpandangan bahwa *homeless* merupakan suatu masalah besar dan merupakan sampah masyarakat. Sedangkan dengan banyaknya organisasi-organisasi baik dari pemerintah ataupun swasta yang didirikan untuk mensupport kaum *homeless* agar mereka dapat hidup dengan layak merupakan bukti nyata dari sebagian besar orang yang berpandangan bahwa kaum *homeless* merupakan kaum yang harus dibantu dan layak mendapatkan bantuan agar dapat terbebas dari kemiskinan.

*Homeless* atau tuna wisma secara umum dapat didefinisikan sebagai seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Mereka biasanya tidur di tempat-tempat umum dan tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Namun saat ini masyarakat Jepang lebih sering menggunakan istilah serapan *homuresu* untuk menyebut *homeless*. Pada masa sebelum perang dan sesaat setelah perang, istilah *homeless* belum dipakai oleh masyarakat Jepang, saat itu istilah yang umum dipakai adalah *furousha* (Iwata, 2007:55)

Dalam bahasa Jepang, istilah umum untuk menyebut kaum *homeless* adalah *furousha* yang berarti gelandangan atau tunawisma, tetapi sebenarnya secara tidak langsung, memiliki makna 'kehilangan keluarga dan relasi sosial'. Pada zaman Tokugawa istilah yang dipakai untuk menyebut kaum *homeless* adalah *yadonashi* dan *mushuku* yang secara harafiah mempunyai arti tidak memiliki rumah tempat tinggal (Gill, 2001:127). Di Jepang tuna wisma biasa di sebut *homuresu* yaitu kata

serapan dari bahasa Inggris *homeless*. Selain menggunakan istilah *homeless*, ada juga istilah lain yang dipakai oleh masyarakat Jepang untuk menyebutkan kaum *homeless*, yaitu *rojouseikatsusha* dan *nojukusha*. Sebutan *rojouseikatsusha* biasanya dipakai oleh orang-orang Tokyo dan sebutan *nojukusha* biasanya dipakai oleh orang-orang Osaka.

Pada masa sebelum perang definisi *homeless* dikemukakan oleh Yokoyama dan diterjemahkan oleh Gill (2001:15) sebagai berikut, *To poor people who cannot afford a house, a single tatami mat in a flop house is a short of home* (Gill, 2001), Artinya adalah, bahwa *homeless* di Jepang adalah orang-orang yang tidak mampu memiliki rumah sehingga menggelar satu tikar tatami sebagai gantinya.

Menurut Kagita (2001:1) yang dimaksud dengan *homeless* yaitu:

ホームレスとは、公演、道路、駅、河川敷などの公共の空間で、デントや小屋を建てたり、段ボールを敷いて寝泊まりするなどして非常の生活を送っている人々。

Terjemahan :

Orang-orang yang hidup dalam kondisi darurat yang tidur dengan menggelar tikar di taman, jalanan, stasiun, bantaran sungai, atau di tempat umum yang terbuka .

Menurut Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang dalam *Ministry of Health, Labour and Welfare* (2002) arti *homeless* adalah sebagai berikut:

都市公園、河川、道路、駅舎、その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者（ホームレスの自立の支援などに関する特別措置法）

Yang artinya, orang-orang yang hidup dalam kondisi darurat atau memperhatikan yang tinggal di taman-taman kota, bantaran sungai, jalanan, sekitar stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya (aturan tindakan khusus mengenai bantuan untuk membuat para *homeless* bisa hidup mandiri)